

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2018), *value for money* merupakan konsep yang digunakan dalam suatu organisasi sektor publik yakni berdasarkan tiga komponen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Elemen ekonomi adalah elemen yang akan membandingkan *input* dalam bentuk masukan dengan *input value* dalam satuan moneter. Elemen ekonomi sering juga disebut *input* yang diperoleh dengan kualitas dan kuantitas dengan menggunakan harga yang terendah. Elemen efisiensi adalah dengan *input* yang serendah mungkin untuk mencapai *output* yang secara maksimal dalam mencapai *output* tertentu. Sedangkan efektivitas adalah tingkat hasil kegiatan yang dicapai dengan berdasarkan target yang ditentukan. Efektivitas adalah membandingkan *outcome* dan *output*.

2.1.2 Tujuan *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2018), *value for money* dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan penggunaan biaya *input* sekecil mungkin untuk pencapaian *output* secara maksimal untuk organisasi dapat mencapai suatu tujuan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi serta kinerja dapat diperbaiki dengan konsep *value for money*.

Adapun tujuan *value for money* yang dilakukan organisasi publik adalah:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan artian pelayanan tercapai sesuai sasaran
2. Meningkatkan pelayanan publik yang sesuai mutu
3. Menurunkan biaya pelayanan publik sebab hilangnya inefisiensi serta terjadinya penghematan dalam menggunakan input
4. Alokasi belanja akan diorientasikan untuk kepentingan publik
5. Meningkatkan pentingnya uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar akuntabilitas publik dilaksanakan.

2.2.3 Pengukuran *Value For Money*

2.2.3.1 Ekonomi

Menurut Mahmudi (2015), ekonomi dikaitkan dengan *input* primer yang digunakan berupa anggaran dan kas termasuk input sekunder seperti tenaga kerja, bahan dan infrastruktur serta barang modal untuk dikonsumsi sesuai dengan kegiatan operasi suatu organisasi yang dilaksanakan. Konsep ekonomi yaitu penggunaan anggaran yang dihemat oleh suatu organisasi dalam pemerolehan *input*. Elemen ekonomi akan mendasarkan pada pemerolehan sumber daya dengan dengan harga yang rendah tetapi dengan kualitas yang baik dalam pelaksanaan suatu program atau aktivitas yang ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2018), ekonomi merupakan kegiatan pembelian barang serta jasa input pada tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Dalam pengertian ekonomi sering disebut sebagai hemat atau tepat guna yang berarti bahwa kehematan tersebut meliputi pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudence*) dan tidak menimbulkan penggunaan dana yang boros. Organisasi sektor publik akan disebut ekonomis jika dapat melakukan penghematan anggaran untuk membiayai aktivitas tertentu. Elemen ekonomi diukur dengan membandingkan *input* atau masukan dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Mardiasmo, 2018).

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value Rp}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2015)

Tabel 2.1 Persentase dan Kriteria Elemen Ekonomi

Persentase	Kriteria
>100%	Ekonomis
85% - 100%	Cukup Ekonomis
65% - 84%	Kurang Ekonomis
<65%	Tidak Ekonomis

Sumber: Mahmudi (2015)

2.2.3.2 Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018), efisiensi akan berkaitan dalam konsep produktivitas. Efisiensi dalam organisasi sektor publik diukur dengan membandingkan *output* atau keluaran yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan (*cost of output*). Kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi akan mencapai efisien jika hasil yang dicapai dalam suatu program (*output*) organisasi tertentu akan diwujudkan menggunakan sumber daya dan dana yang serendah mungkin (*spending well*). Semakin besar keluaran yang dicapai dibandingkan masukan atau semakin rendah *input* yang digunakan untuk *output*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi dalam organisasi sektor publik.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2015)

Tabel 2.2 Persentase dan Kriteria Elemen Efisiensi

Persentase	Kriteria
< 90%	Sangat Efisien
90% - 99%	Efisien
100%	Cukup Efisien
>100%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2015)

2.2.3.3 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas didasarkan hubungan dalam mencapai tujuan atau hasil guna berupa target kebijakan. Efektivitas juga berkaitan antara *output* berupa keluaran dan tujuan serta sasaran yang perlu dicapai. Aktivitas operasional dalam organisasi akan disebut efektif jika kegiatan yang dilakukan mencapai sasaran akhir dari sebuah kebijakan (*spending wisely*). Organisasi sektor publik akan dapat melihat seberapa besar jangkauan yang akan berdampak serta akibat dari *output* program yang dihasilkan dalam mencapai tujuan dengan menerapkan pengukuran efektivitas.

Menurut Halim (2014), efektivitas adalah suatu ukuran yang akan menunjukkan berhasil atau tidaknya dalam pencapaian tujuan. Elemen efektivitas melakukan pengukuran pada hasil akhir dalam pelayanan yang diberikan untuk selanjutnya dihubungkan dengan *output* (*cost of outcome*).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2015)

Tabel 2.3 Persentase dan Kriteria Elemen Efektivitas

Persentase	Kriteria
$\leq 100\%$	Efektif
85% - 99%	Cukup Efektif
65% - 84%	Kurang Efektif
$\leq 65\%$	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2015)

2.2.4 Kinerja

2.2.4.1 Pengertian Kinerja

Menurut Moeheriono (2014), kinerja berasal dari kata prestasi kerja atau *performance* yang diartikan sebagai bentuk gambaran tentang suatu program kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi serta misi organisasi yang berada pada perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja juga dapat diartikan sebagai hasil kerja dan tingkat pencapaian seseorang pada organisasi dalam mencapai tujuan atau visi dan misi. Hal-hal yang ingin dicapai pada organisasi akan dimuat pada perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*). Dengan kata lain bahwa kinerja disebut sebagai prestasi oleh suatu organisasi yang dicapai pada periode tertentu.

2.2.4.2 Penilaian Kinerja

Menurut Mardiasmo (2018), penilaian kinerja dalam suatu organisasi merupakan aspek penting untuk sistem pengendalian. Penilaian kinerja organisasi sektor publik akan memperlihatkan tujuan yang ditentukan pada tingkat efisiensi dan efektivitas. Dengan penilaian kinerja, sektor publik dapat mengetahui ketercapaian tujuan dan dapat memperbaiki kinerja periode selanjutnya. Indikator

kinerja yang dilakukan kemudian akan dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan (Halim, 2014). Indikator kinerja tidak hanya dikembangkan untuk kinerja keuangan saja yaitu *input* dan *output* tetapi juga diterapkan pada indikator hasil yang berupa *outcome*. Tinjauan terhadap indikator kinerja dapat terus dilakukan sebagai upaya untuk perbaikan kinerja berkelanjutan. Menurut Mahmudi (2015), karakteristik indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sederhana serta mudah dipahami
2. Dapat diukur
3. Dapat dikuantifikasikan
4. Dikaitkan pada standar atau target kinerja
5. Berfokus pada customer service, kualitas dan efisiensi
6. Dikaji dengan teratur.

2.2.5 Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus perkembangan desa yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
3. Tugas pembantuan dari pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 menyatakan bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2.2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

2.2.6.1 Komponen APBDes

Menurut Sujarweni (2015), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah anggaran yang dibuat setiap satu tahun sekali sebagai dasar keuangan yang dikelola oleh Pemerintahan Desa yang telah disepakati oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan desa, meliputi:

1. Pendapatan

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan yang termasuk hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Daerah (PADes), Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah (PADes) adalah pendapatan yang bersumber dari dalam desa atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan desa. Transfer desa berasal dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan meliputi APBN dan APBD. Sedangkan pendapatan lain-lain meliputi

penerimaan hasil kerjasama oleh desa dan bantuan perusahaan yang bertempat di desa, hibah dan sumbangan oleh pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja periode sebelumnya yang menjadi penerimaan desa pada periode berjalan, bunga bank, serta pendapatan lain yang dianggap sah.

2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang menjadi kewajiban desa pada kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa berguna pada penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa menurut kelompok diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
- e. Belanja Tak Terduga seperti keadaan darurat dan bencana alam

Belanja desa menurut jenisnya meliputi belanja pegawai yang digunakan sebagai pengeluaran penghasilan tetap yang dibayarkan setiap bulan, belanja barang dan jasa yang dikeluarkan dalam pembelian barang dengan nilai manfaat kurang dari dua belas bulan. Kemudian, belanja modal yaitu pembelian barang atau bangunan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang masih perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik saat tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada saat tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa menurut kelompok dibagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Anggaran yang diterapkan

dalam sektor publik disajikan dalam APBN dan APBD untuk merencanakan keuangan periode mendatang tentang jumlah, pendapatan, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan, program kerja serta kegiatan organisasi. Anggaran berupa catatan keuangan dapat digunakan untuk membuat rencana serta tindakan yang diambil dalam memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang.

2.2 Kajian Empiris

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Judul (Tahun)	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ika Fitriyani, Muhammad Nur Fietroh Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Telaga Kecamatan Lenangguar Dalam Meningkatkan <i>Good Governance</i> (2022)	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Telaga dari segi rasio efektivitas untuk tahun 2016 - 2020 keuangan desa sudah sangat efektif karena dengan nilai yang diperoleh lebih dari 100%, yaitu 2016 (100%), 2017 (197,5%), 2018 (107,8%), dan 2019 (102,3%), dan 2020 (100%). Kinerja keuangan desa telaga dari segi rasio efisiensi sangat efisiensi untuk Alokasi Dana Desa (ADD) keuangan Desa Telaga, yaitu pada tahun 2016 - 2017 memiliki efisiensi 100%, tahun 2018 (99,9%), dan tahun 2019 - 2020 (100%). Dana Desa (DD) Desa Telaga efisiensi, dari tahun 2016 sampai dengan 2020 masuk dalam kategori efisien dengan nilai yang diperoleh mencapai kriteria 100%, yaitu sebesar 100% dari tahun 2019 - 2020. Segi rasio ekonomi keuangan Desa Telaga sangat ekonomis, dari tahun 2016 - 2020 dalam kategori ekonomis dari tahun 2016 (100%), 2017 (105,3%), dan 2018 - 2020 dengan nilai yang diperoleh lebih

			dari 100%, yaitu sebesar tahun 2016 (100%), tahun 2017 (105,3%), tahun 2018-2020 (100%). Sistem kontrol dari pihak terkait, terutama masyarakat desa telah berjalan dengan lebih baik.
2.	Isnah Mar'atus Sholikhah, Novi Khoiriawati. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Analisis <i>Value For Money</i> (2022)	Kuantitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Pucangsimo tahun 2017 sampai 2021 berada pada kategori ekonomis yaitu dimana hasil rasio pada tahun 2017 sebesar 100,27%, tahun 2018 sebesar 100,46%, tahun 2019 sebesar 102,55%, tahun 2020 sebesar 115,73%, dan tahun 2021 sebesar 100,28%.. Dari segi efisiensi, pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan hasil efisien sedangkan pada tahun 2017, 2020, dan 2021 menunjukkan hasil tidak efisien yaitu dimana hasil rasio pada tahun 2017 sebesar 100,98%, tahun 2018 sebesar 99,61%, tahun 2019 sebesar 98,06%, tahun 2020 sebesar 102,02%, dan tahun 2021 sebesar 100,04%. Dari segi efektivitas, pada tahun 2017, 2018, dan 2019 menunjukkan hasil efektif sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan hasil cukup efektif yaitu dimana hasil rasio pada tahun 2017 sebesar 100,13%, tahun 2018 sebesar 100,23%, tahun 2019 sebesar 100,07%, tahun 2020 sebesar 86,49%, dan tahun 2021 sebesar 99,99%.
3.	Elsa Lutfiawan Analisis <i>Value</i>	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomi pada kinerja Kecamatan Bogor

	<i>For Money</i> Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Periode 2018- 2020 (2022)	& Deskriptif Kualitatif	Selatan pada tahun 2018 - 2020 sudah termasuk kedalam kriteria ekonomis. Rasio efisiensi pada Kecamatan Bogor Selatan menunjukkan kinerja keuangan pada tahun 2018 rata-rata 91,57%, 2019 rata-rata 83,16%, 2020 rata-rata 91,75% dimana nilai tersebut berada pada kategori cukup efisien. Rasio efektivitas untuk tahun 2018 - 2020 menunjukkan kinerja keuangan pada tahun 2018 berada pada kriteria efektif, untuk tahun 2019 berada pada kriteria cukup efektif, dan pada tahun 2020 berada pada kategori cukup efektif.
4.	Nisa' Nur Faidah Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Dengan Pendekatan Nilai Uang Di Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (2022)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tiga tahun anggaran kinerja keuangan pemerintah Desa Dapurkejambon termasuk dalam kriteria ekonomi karena secara konsisten melebihi persyaratan ekonomi dalam hal persentase hasil. Tiga tahun anggaran kinerja keuangan pemerintahan Desa Dapurkejambon termasuk dalam kriteria kurang efisien. Tiga tahun anggaran kinerja keuangan pemerintahan Desa Dapurkejambon mengalami naik turun atau fluktuasi. Di mana pada tahun pertama menunjukkan hasil persentase yang dapat dikatakan kurang efektif. Kemudian tahun kedua mengalami kenaikan hasil persentase dapat dikatakan sangat efektif. Tahun ketiga mengalami penurunan hasil persentase dikatakan efektif.

5.	Yolandha Aisyah Hadaryen, Endro Sugiartono Evaluasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Konsep <i>Value For Money</i> (Studi Kasus Pada Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember) (2021)	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja keuangan kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dari rasio ekonomi pada tahun 2017 - 2019 tidak tercapai karena menghasilkan rasio tingkat ekonomi kurang dari 100% dan di tahun 2020 menunjukkan hasil ekonomis karena menghasilkan rasio tingkat ekonomis lebih dari persentase 100%. Hal ini dapat dilihat dari total anggaran yang disediakan tiap tahunnya, habis terpakai dan di tahun 2017 dan 2019 melebihi anggaran yang telah disiapkan dalam memenuhi seluruh program kerja setiap tahunnya. Tahun 2020 telah mampu mengelola keuangan dengan hemat. Rasio efisiensi menunjukkan hasil efisien berimbang karena menghasilkan rasio tingkat efisien sebesar 100%. Rasio efektivitas menunjukkan hasil efektif karena menghasilkan rasio tingkat efektif melebihi persentase 100%.
6	Marisa S. B Seran <i>Value For Money</i> : Suatu Analisis Pengaruh Kinerja	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa rasio ekonomi kinerja pengelolaan keuangan desa pada Desa Subun Bestobe yakni pada tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan rasio 100.54%, 103.89% dan 101.09% mengalami peningkatan yang cukup baik. Dari hal ini terlihat bahwa kinerja pengelolaan keuangan Desa Subun Bestobe pada 3 tahun berturut-turut terlihat

	Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Subun Bestobe (2021)		pada taraf sangat ekonomi yakni kinerja lebih kecil dari 100%. Sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 kinerja pemerintah desanya berada pada kategori ekonomis dikarenakan rasionya berada pada kategori 100%. Rasio efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa Subun Bestobe tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 masih berada dalam kategori tidak efisien. Rasio efektivitas kinerja pengelolaan keuangan Desa Subun Bestobe terlihat penggunaan anggaran termasuk dalam kategori sangat efektif, karena pemerintah desa mampu menggunakan dengan baik seluruh anggaran yang ada.
7	Nurlayli Magfiroh Analisis Penerapan Pengukuran <i>Value For Money</i> Pada APBDes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintahan Desa Parengan dari rasio ekonomi selama tiga tahun anggaran dari tahun 2016 - 2018 berada pada kategori ekonomis karena berada pada persentase lebih dari 100%. Segi rasio efisiensi tahun 2017 diperoleh hasil lebih dari 100%. Pemerintahan Desa Parengan terus berupaya dalam memperbaiki kinerja keuangan dari segi efisiensi sehingga pada tahun 2016 diperoleh hasil 93,92% dan tahun 2018 yaitu 90,77% menunjukkan hasil antara 90% sampai 99% sehingga dikategorikan efisien karena realisasi belanja lebih rendah dari realisasi pendapatan. Segi rasio efektivitas dari tahun 2016 sampai 2018 terus menunjukkan kenaikan.

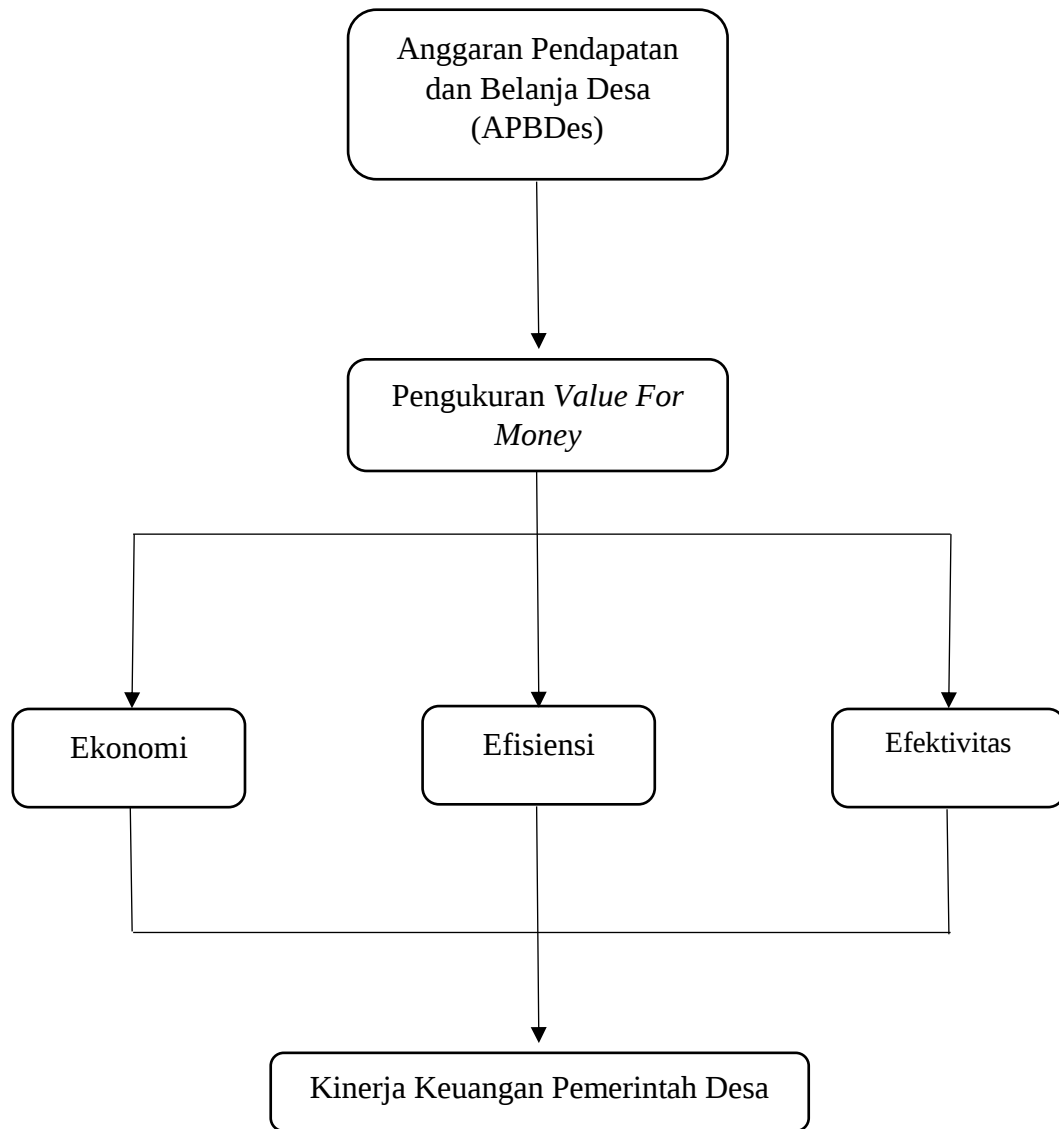
	Mojokerto) (2020)		
8	Tyas Widoyekti Wuryanto, Eni Dwi Susliyanti Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan <i>Value For Money</i> (Studi Pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jambidan Tahun Anggaran 2014 - 2016) (2019)	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan dalam APBDes Desa Jambidan berdasarkan rasio ekonomi pada tahun 2014-2016 tergolong dalam kategori ekonomi hal ini terlihat dari perhitungan selama 3 tahun tersebut yang hasilnya kurang dari 100%. Berdasarkan rasio efisiensi pada tahun 2014 tergolong tidak efisien, namun pada tahun 2015-2016 mampu masuk dalam kategori sangat efisien. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan pada tahun 2014 yang berada di atas angka 100% yang disebabkan adanya pemborosan pada anggaran organisasi sosial, pemuda dan olahraga, kesenian, dan keagamaan, selain itu ada beberapa pos yang muncul biaya padahal sebelumnya tidak dianggarkan. berdasarkan rasio efektivitas pada tahun 2014-2015 tergolong cukup efektif dan pada tahun 2016 tergolong kategori efektif. Terlihat dari hasil perhitungan dimana pada tahun 2014-2015 berada di bawah angka 100% namun masih dalam kategori cukup efektif dan pada tahun 2016 berada di atas angka 100% yang berarti efektif. Ini berarti bahwa Desa Jambidan mampu menggunakan potensi desa.
9	Dika Husni Sanjaya, Maswar Patuh	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari segi rasio ekonomis menunjukkan nilai perolehan pengukuran kinerja dikatakan

	Priyadi Analisis <i>Value For</i> <i>Money</i> Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya (2019)	ekonomis atau hemat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya anggaran yang terjadi pada tahun 2016 sebesar 66,74% dan 2017 sebesar 71,07%. Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja dikatakan efisien. Pada tahun 2016 program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu mencapai 131,84%, program upaya kesehatan masyarakat yaitu 147,99%, dan program obat dan perbekalan kesehatan yaitu 172,00%. Dari perhitungan nilai efisiensi kinerja dihasilkan nilai efisiensi sebesar 150,61% dari biaya anggaran yang tersedia. Sedangkan di tahun 2017 hasil perbandingan output dengan input pada program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu yaitu 126,56%, program upaya kesehatan masyarakat yaitu 149,56%, dan program obat dan perbekalan kesehatan yaitu 185,15%. Dari perhitungan diatas dihasilkan nilai efisiensi sebesar 153,76% dari dana anggaran yang tersedia. Ditinjau dari segi efektivitas dalam laporan kinerja menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja dikatakan berhasil mencapai tujuan yaitu capaian dengan target yaitu sebesar 106,33%, program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dengan ditunjukkan melalui hasil rata – rata rasio efektivitas yang membandingkan capaian
--	---	--

			dengan target sebesar 101,32%, program obat dan perbekalan kesehatan, ditunjukkan melalui hasil rata – rata rasio efektivitas yang membandingkan capaian dengan target sebesar 130,66%.
10	Rahmi Sari, Mirna Indrian Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif (Studi Pada Desa Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar) (2018)	Deskriptif Kuantitatif & Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa yang melakukan penghematan terbesar dalam bidang pembangunan adalah Desa Bineh Blang dengan jumlah anggaran Rp 488.641.445. Sedangkan pada pelaksanaannya jumlah anggaran yang digunakan hanya sebesar Rp 469.212.982. Dari jumlah tersebut, maka terjadi penghematan anggaran sebesar Rp 19.428.463. Desa lain yang melakukan penghematan di bidang pembangunan adalah Desa Santan dengan jumlah penghematan sebesar Rp 6.559.891, Desa Meunasah Deyah sebesar Rp 4.015.050 dan Desa Cot Gud sebesar Rp 3.645.550. Hasil analisis data pengukuran ekonomi bidang pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa dari 34 desa yang dianalisis terdapat 2 desa dengan jumlah penghematan tertinggi, yaitu Desa Bineh Blang dengan jumlah penghematan sebesar Rp 3.099.050 dan Desa Tanjong dengan penghematan sebesar Rp 1.800.000. Selain itu terdapat pula 2 desa yang tidak memiliki jumlah penghematan, yaitu Desa Paleuh Blang dan Desa Siron. Rasio efisiensi tertinggi pada program pembangunan gampong yaitu Desa Bineh Blang, dimana rasio efisiensi yang dicapai sebesar 104% dengan input yang

			digunakan sebesar 96%. Sementara itu, desa lainnya yang sudah efisien di bidang pembangunan gampong adalah Desa Cot Gud, Desa Santan dan Desa Menasah deyah dengan rasio efisiensi sebesar 101% dan output yang digunakan sebesar 99%. Sementara bidang pemberdayaan masyarakat, analisis data pengukuran efisiensi menunjukkan bahwa Desa Tanjong dan Desa Bineh Blang merupakan dua desa dengan rasio efisiensi tertinggi, yaitu sebesar 111% dan 105%, dimana input yang digunakan sebesar 90% dan 95% dengan output yang berhasil dicapai 100%. Sedangkan rata-rata desa lain menggunakan input sebesar 98% dengan output yang berhasil dicapai 100%, sehingga rasio efisiensi mencapai 102%. Berdasarkan hasil analisis data pengukuran efektivitas pada program pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong tahun 2016, kedua program ini sudah efektif.
--	--	--	---

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual